

RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA
TA. 2022



Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kode Pos 27573
Website : diskominfo.dharmasrayakab.go.id, email : diskominfo@dharmasrayakab.go.id

 dharmasrayakab.go.id  Dinas Kominfo Dharmasraya  [kominfo_dh](https://twitter.com/kominfo_dh)
 Diskominfo Dharmasraya  [diskominfo.dharmasraya](https://www.instagram.com/diskominfo.dharmasraya)

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 ini dapat selesai pada waktunya. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan seluruh SKPD, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam peningkatan system informasi dan komunikasi bagi pemerintah dan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai upaya membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya. Upaya yang dilakukan pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Kabupaten Dharmasraya lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis.

Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen Rencana Kerja (RENJA) 2022 ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terimakasih.

SIKABAU,

2021

Plt KEPALA,

RENO LAZUARDI, S.Pd.M.Si

Pembina Tk I/ IV b

NIP. 19751223 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

SK TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

SK RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



PEMERITAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Telp. 0754 (451578) Sikabau Kode Pos (27573)
Website: dharmasrayakab.go.id e-mail : diskominfo.dharmasrayakab.go.id



KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR: 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2021 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Kabupaten Dharmasraya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh Bagian di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2021

Plt KEPALA,

RENO LAZUARDI, S.Pd.M.Si
Pembina Tk I/ IV b
NIP. 19751223 200012 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Dharmasraya sebagai laporan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya.



PEMERITAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Telp. 0754 (451578) Sikabau Kode Pos (27573)
Website: dharmasrayakab.go.id e-mail : diskominfo.dharmasrayakab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR: 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan pembangunan, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;

b. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusunnya dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Kabupaten Dharmasraya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
2. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
3. Mengusulkan konsep rencana kerja kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2021

Plt KEPALA,

RENO LAZUARDI, S.Pd.M.Si
Pembina Tk I/ IV b
NIP. 19711223 200012 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Dharmasraya sebagai laporan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya.

**LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2021
TANGGAL : 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2022**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
3.	Kasubag. Keuangan, Program dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kabid. Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Kabid. Persandian	Anggota
6.	Kabid. Statistik	Anggota
7.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasi. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
9.	Kasi. Penyelenggaraan E-government	Anggota
10.	Kasi. Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Kasi. Tata Kelola Persandian	Anggota
12.	Kasi. Operasional Pengamanan Persandian	Anggota
13.	Kasi. Pengawasan dan Evaluasi Persandian	Anggota
14.	Kasi. Pengelolaan Data Statistik	Anggota
15.	Kasi. Informasi Data Statistik	Anggota
16.	Boffin Kharsananda, S.Kom.M.Eng	Sekretariat
17.	Asyrawi Mulia, S.Kom	Sekretariat
18.	Putra Darmawan, S.Kom	Sekretariat
19.	Gilang FP Utama, S.I.Kom	Sekretariat
20.	Asnimar, S.Sos	Sekretariat
21.	Dalpison Hendrik, S.ST	Sekretariat
22.	Yufrizal, A.Md	Sekretariat
23.	Fergi Yandi, A.Md	Sekretariat
24.	Febra Maspianto	Sekretariat
25.	Putri Maharani, S.IP	Sekretariat

Plt KEPALA,

**RENO LAZUARDI, S.Pd.M.Si
Pembina Tk I/ IV b
NIP. 19711223 200012 1 003**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke V dari Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra –OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 – 2022, dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD tahun 2022, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2025. Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2016 - 2022 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.



Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) PD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada tahun 2022 merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor (1308);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 64)

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.



Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah untuk:

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022.
- Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Diskominfo sesuai aturan yang berlaku.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan mengacu kepada penetapan Renstra Tahun 2016-2022 yang pada saat ini mengacu kepada RKPD 2022 Kabupaten Dharmasraya. Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (input), proses (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan Organisasi pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, buah, hari, persen dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Dharmasraya Tahun 2016 - 2021 yang mengacu kepada RPJP 2005 - 2025, Visi Misi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, dituangkan dalam Evaluasi Renja 2020 Untuk Memperbandingkan Capaian Target Yang Dicapai dalam RPJPD 2005-2025 Capaian Renstra 2016-2021. Untuk hasil pengukuran Evaluasi tersebut dapat dilihat hasil penjabarannya.

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 2 (dua) tujuan dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis. Tujuan, indikator tujuan dan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

➤ Sasaran Strategis :

Meningkatnya Transparansi Pemerintah Daerah dan Akses Masyarakat terhadap Informasi Pembangunan Daerah

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Transparansi Pemerintah Daerah dan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	100%	21%	21%	Tidak Berhasil
	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Rata-Rata Kelompok Tertimbang				321%	Berhasil
Rata-Rata Capaian Sasaran (<i>nilai mean</i>)					80,25

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Website dan Melakukan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Website adalah kumpulan halaman suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu, saling berhubungan dan dapat diakses secara luas. Manfaat website yaitu menyediakan informasi yang bisa mudah diakses, dilihat, dan diketahui orang banyak. Pembaruan informasi merupakan pemberian informasi atau up date informasi. Website resmi milik Pemerintah Daerah berarti website resmi yang menyajikan informasi kegiatan dan dikelola perangkat daerah. Keberadaan website dibuktikan dengan alamat website.

Sasaran strategis pertama melalui indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi, dalam tahun 2021 ditargetkan 100% untuk mendukung penyebaran informasi telah dilakukan pengaktifan web site. Dalam hal ini dibuat website untuk OPD dan beberapa

website tambahan. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu website induk dalam dharmasraya.go.id yang dikelola oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Humas sebanyak 1 unit dengan sub domain 52 unit terdiri dari website OPD dan PPID, JDIH, rumah data, sistem informasi keprotokolan dan sistem informasi persuratan elektronik. Dalam tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% dan telah tercapai seluruhnya di tahun 2020, dan tahun 2021 dikembangkan website untuk bagian di Sekretariat Daerah sebanyak 10 unit, namun ada 1 UPT yang belum memiliki website yaitu RSUD Sungai Rumbai yang merupakan pembentukan baru dan diresmikan tahun 2020, sehingga belum terhitung dalam target capaian 5 tahun yang akan ditargetkan untuk pembuatan website di tahun 2022.

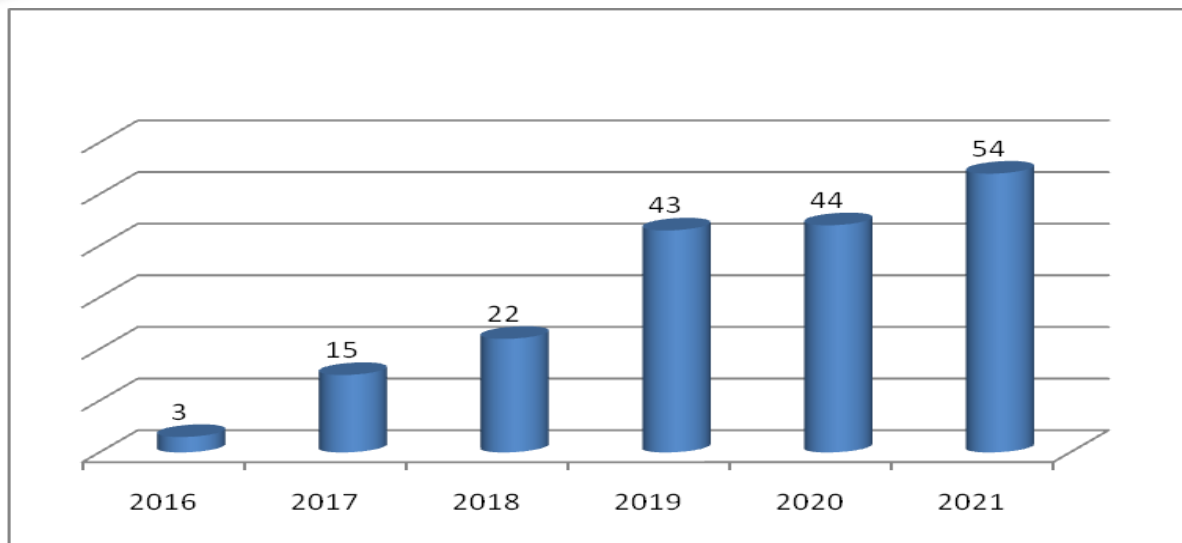
Tabel 3.2

Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%
		- Jumlah OPD memiliki Website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 Kali sebulan	38 OPD	38 OPD	
		- Jumlah OPD di Kabupaten Dharmasraya	38 OPD	38 OPD	

Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 telah tercapai seluruhnya 100%. Tahun 2021 dikembangkan website untuk bagian di Sekretariat Daerah sebanyak 10 unit. Penambahan website tahun 2016 sampai 2021 seperti ditampilkan.

Jika dilihat dari peningkatan jumlah website setiap tahun, maka peningkatan pembuatan website OPD tertinggi di tahun 2019 dari tahun 2018, tahun 2020 hanya difokuskan kepada OPD yang belum memiliki website yaitu RSUD Sungai Dareh dan tahun 2021 difokuskan pada pengembangan website Sekretariat Daerah.



Gambar 3.2

Peningkatan Jumlah Website Tahun 2016 Sampai Tahun 2021

Alamat dan data domain dan subdomain website yang dibuat setiap tahun seperti ditampilkan dibawah ini.

Tabel 3.4
Website yang Dibuat Tahun 2016

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Website Resmi Pemkab Dharmasraya	http://dharmasrayakab.go.id
2.	Website Bagian Hukum Setda	http://jdih.dharmasrayakab.go.id
3.	PPID	http://ppid.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.5
Website yang Dibuat Tahun 2017

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	http://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id
2.	Website Dinas Kesehatan	http://dinkes.dharmasrayakab.go.id
3.	Website Dinas Pendidikan	http://disdik.dharmasrayakab.go.id
4.	Website Bappeda	http://bappeda.dharmasrayakab.go.id
5.	Website Diskominfo	http://diskominfo.dharmasrayakab.go.id
6.	Website DPMPSTP	http://pmpstp.dharmasrayakab.go.id
7.	Website Dinas Kumperdag	http://diskumperdag.dharmasrayakab.go.id
8.	Website Dinas Budparpora	http://disbudparpora.dharmasrayakab.go.id
9.	Website Dinas Pertanian	http://dinas pertanian.dharmasrayakab.go.id
10.	Website Dinas Pangan dan Perikanan	http://dpp.dharmasrayakab.go.id
11.	Website Dinas LH	http://dlh.dharmasrayakab.go.id
12.	Website Dinas PU	http://dispupr.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.6
Website yang Dibuat Tahun 2018

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Website inspektorat	http://inspektorat.dharmasrayakab.go.id
2.	Website BKD	http://bkd.dharmasrayakab.go.id
3.	Website BKPSDM	http://bkpsdm.dharmasrayakab.go.id
4.	Website Dinas PMD	http://pmd.dharmasrayakab.go.id
5.	Website Dinas SOSP3APPKB	http://dinsos.dharmasrayakab.go.id
6.	Website Dinas Nakertrans	http://distransnaker.dharmasrayakab.go.id
7.	Website Dinas Perkimtan	http://perkimtan.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.7
Website yang Dibuat Tahun 2019

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Dinas Perhubungan	http://dishub.dharmasrayakab.go.id
2.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	http://dpkd.dharmasrayakab.go.id
3.	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	http://kesbangpol.dharmasrayakab.go.id
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	http://bpbd.dharmasrayakab.go.id
5.	Sekretariat DPRD	http://setwan.dharmasrayakab.go.id
6.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	http://satpolpp.dharmasrayakab.go.id
7.	Kecamatan Pulau Punjung	http://kec-pulaupunjung.dharmasrayakab.go.id
8.	Kecamatan IX Koto	http://kec-sembilankoto.dharmasrayakab.go.id
9.	Kecamatan Sitiung	http://kec-sitiung.dharmasrayakab.go.id
10.	Kecamatan Tiumang	http://kec-tiumang.dharmasrayakab.go.id
11.	Kecamatan Timpeh	http://kec-timpeh.dharmasrayakab.go.id
12.	Kecamatan Padang Laweh	http://kec-padanglaweh.dharmasrayakab.go.id
13.	Kecamatan Koto Baru	http://kec-kotobarau.dharmasrayakab.go.id
14.	Kecamatan Koto Salak	http://kec-kotosalak.dharmasrayakab.go.id
15.	Kecamatan Sungai Rumbai	http://kec-sungairumbai.dharmasrayakab.go.id
16.	Kecamatan Koto Besar	http://kec-kotobesar.dharmasrayakab.go.id
17.	Kecamatan Asam Jujuhan	http://kec-asamjujuhan.dharmasrayakab.go.id
18.	Rumah Data (Statistik Nagari)	http://rumahdata.dharmasrayakab.go.id
19.	Sistem Informasi Keprotokolan	http://sikadar.dharmasrayakab.go.id
20.	Sistem Informasi Persuratan Elektronik	http://simpler.dharmasrayakab.go.id
21.	Sistem Pustaka On-Line	http://inlis.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.8
Website yang Dibuat Tahun 2020

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	RSUD Sungai Dareh	http://rsud.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.9
Website yang Dibuat Tahun 2021

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Bagian Umum dan Perlengkapan	http://umum.setda.dharmasrayakab.go.id
2.	Bagian Hukum	http://hukum.setda.dharmasrayakab.go.id
3.	Bagian Organisasi	http://organisasi.setda.dharmasrayakab.go.id
4.	Bagian Humas	http://humas.setda.dharmasrayakab.go.id
5.	Bagian Protokol	http://protokoler.setda.dharmasrayakab.go.id
6.	Bagian Tapem	http://pemerintahan.setda.dharmasrayakab.go.id
7.	Bagian Perekonomian	http://perekonomian.setda.dharmasrayakab.go.id
8.	Bagian Kesra	http://kesra.setda.dharmasrayakab.go.id
9.	Bagian Pembangunan	http://pembangunan.setda.dharmasrayakab.go.id
10.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	http://pbj.setda.dharmasrayakab.go.id

Dalam pencapaian strategi peningkatan perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi menggunakan domain dharmasrayakab.go.id. Proses pembuatan website tahun 2016 sampai tahun 2018 digunakan pihak ketiga. Pada tahun 2018 telah dilakukan rekrutmen tenaga ahli programmer yang mulai aktif tahun 2019 dan salah satu target kerja tenaga ahli programmer untuk mampu membuat website dan tahun 2021 lebih dimanfaatkan untuk pengembangan dan penyempurnaan website yang sudah ada.

2. Persentase Nagari Yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Website adalah kumpulan halaman suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu, saling berhubungan dan dapat diakses secara luas. Manfaat website yaitu menyediakan informasi yang

bisa mudah diakses, dilihat, dan diketahui orang banyak. Pembaruan informasi merupakan pemberian informasi atau up date informasi. Website resmi Nagari berarti website resmi yang menyajikan informasi kegiatan dan dikelola Nagari. Keberadaan website dibuktikan dengan alamat website.

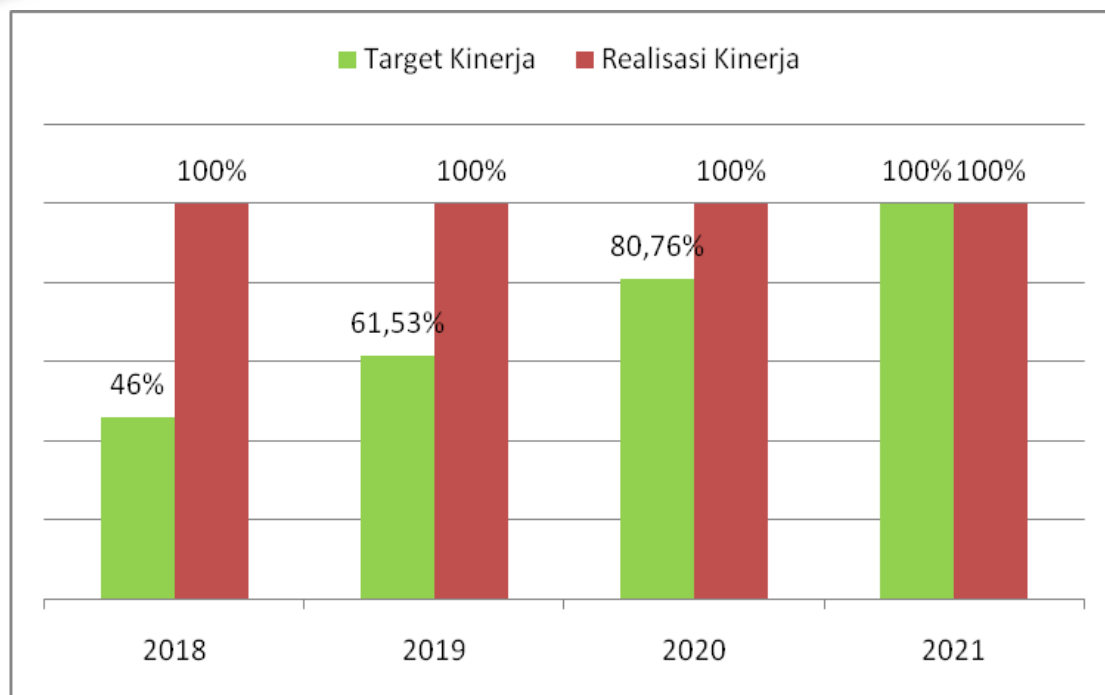
Sasaran strategis pertama melalui indikator kinerja persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi, dalam tahun 2020 ditargetkan 100% untuk mendukung penyebaran informasi telah dilakukan pengaktifan web site. Dalam tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%.

Tabel 3.11
Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Nagari yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	3	4	5	6
1	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%
		- Jumlah Nagari memiliki Website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 Kali sebulan	52 Nagari	52 Nagari	
		- Jumlah Nagari di Kabupaten Dharmasraya	52 Nagari	52 Nagari	

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 dengan tahun 2020 sama telah tercapai 100% dan tidak ada lagi penambahan dan pengurangan kuantitas, namun terjadi penurunan kualitas, dimana terjadi kurang aktifan dalam pengisian berita selama pandemic, karena keterbatasan komunikasi karena adanya pandemic COVID 19.

Pencapaian strategi pembentukan website Nagari dengan memanfaatkan SDM Nagari berupa dana dan tenaga dengan dikoordinasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga langsung dapat tercapai 100% dalam tahun 2021. Pemanfaatan tenaga monitoring tahun 2021 dilaksanakan bersama antara PNS dan Non PNS melalui fasilitasi whatsapp.



Gambar 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja 2018 s.d 2021 dalam IKU Persentase Nagari yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi

3. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Nagari

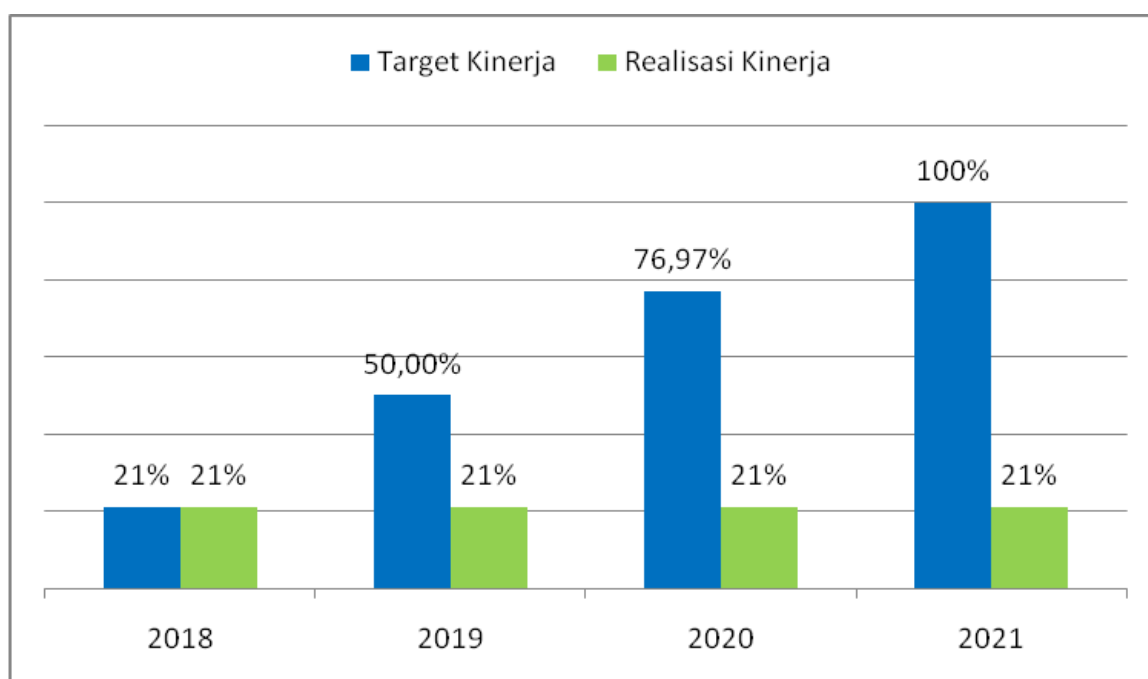
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai layanan informasi masyarakat terhadap isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. KIM dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembentukan KIM berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat Nagari dibuktikan dengan SK Wali Nagari.

Sasaran strategis pertama melalui indikator kinerja cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat Nagari. Peningkatan peran KIM ini dilaksanakan untuk meningkatkan informasi pembangunan dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik berdasarkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Apabila dilihat perbandingan antara target dan hasil capaian dalam tahun 2021 ditargetkan 100% atau tercapai kegiatan 52 kelompok, namun hanya terealisasi 21% atau 11 kelompok. Kelompok ini baru dibentuk dalam 1 kecamatan 1 nagari belum mencakup seluruh nagari.

Tabel 3.13
Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Nagari Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	100%	21%	21%
		- Jumlah pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	52 klp	11 klp	
		- Jumlah Nagari di Kabupaten Dharmasraya	52 Nagari/ 52 Klp	52 Nagari/ 52 klp	



Gambar 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2021 dalam IKU Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Nagari

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 dengan tahun 2020 sama-sama

tercapai 11 kelompok. Tahun 2021 tidak dilakukan tahapan pembinaan karena keterbatasan anggaran.

Tabel 3.14
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab. Dharmasraya

No	Nagari	Kecamatan	Tahun Pembentukan
1.	Sungai Duo	Sitiung	2016
2.	Koto Ranah	Koto Besar	2016
3.	Taratak Tinggi	Timpeh	2017
4.	Simalidu	Koto Salak	2017
5.	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai	2017
6.	Sungai Langkok	Tiumang	2017
7.	Koto Baru	Koto Baru	2018
8.	Muaro Sopan	Padang Laweh	2018
9.	Pulau Punjung	Pulau Punjung	2018
10.	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan	2018
11.	Silago	Sembilan Koto	2018

Pencapaian target pencakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Nagari belum sesuai dengan target dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemanfaatan SDM di Kasi yang konsen untuk pencapaian target ini. Kebutuhan sarana dan prasarana kendaraan ke nagari menggunakan kendaraan operasional, namun belum didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Nagari dan Kecamatan.

4. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Jaringan terintegrasi pelayanan digital adalah sistem [telekomunikasi](#) dimana layanan [data](#), [suara](#), dan [gambar](#) diintegrasikan ke dalam suatu [jaringan](#) menyediakan konektivitas digital untuk menunjang ruang lingkup pelayanan yang luas. Keuntungan penggunaan jaringan telekomunikasi terintegrasi yaitu: kecepatan pelayanan,

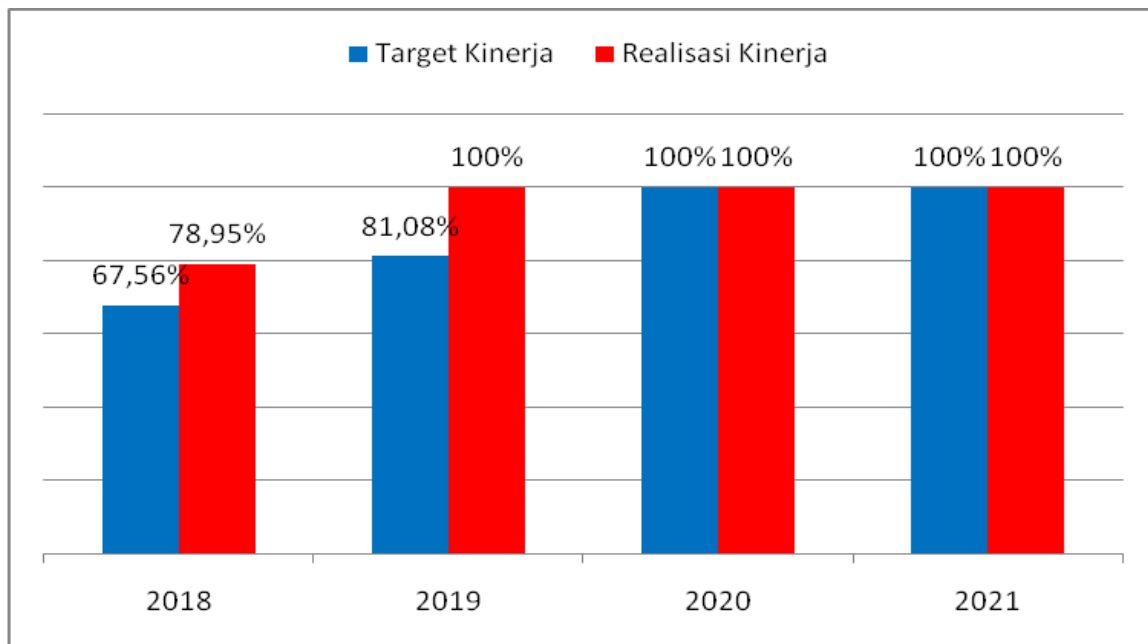
efisien karena dapat mengirim berbagai jenis layanan, efisien dalam pemanfaatan [waktu](#), dan hemat biaya. Pembangunan jaringan terintegrasi memudahkan perangkat daerah dalam melayani dari unitnya masing-masing.

Apabila dilihat perbandingan antara target dan hasil capaian dalam tahun 2021 telah sesuai target 100% tercapai 100%. Hal ini terjadi karena tuntutan kemajuan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintah yang bermuara dalam pelayanan publik. Pengintegrasian pertama yang dirasa sangat cepat dibutuhkan yaitu aplikasi SIPKD dan SIMDA serta CMS guna menekan terjadinya korupsi, sehingga diperlukan percepatan pengintegrasian, namun proses pengintegrasian yang dilaksanakan dengan sistem radio menggunakan astinet. Usaha yang dilakukan lainnya berupa peningkatan kualitas, dimana pemeliharaan terhadap kerusakan jaringan yang lebih diutamakan.

Tabel 3.16
Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	100%	100%	100%
		- Jumlah perangkat daerah yang memiliki jaringan telekomunikasi	38 OPD	38 OPD	
		- Jumlah perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya	38 OPD	38 OPD	

Pembangunan jaringan terintegrasi dimulai dari tahun 2017 dan terus ditingkatkan. Di masa mendatang kualitas jaringan akan terus ditingkatkan baik dari segi penataan, kekuatan signal maupun jenis jaringan yang digunakan. Tahun 2020 dan Tahun 2021, peningkatan jaringan terus diupayakan meskipun dana APBD terbatas, namun menggunakan sumber APB Nagari dan dana BOS untuk proses pembangunan jaringan dan bandwidth disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Peningkatan jumlah perangkat daerah yang terintegrasi dapat ditampilkan sebagai berikut.



Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2021 dalam IKU Persentase
Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi

Data pembangunan jaringan setiap tahun ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 3.17
Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2017

No	Nama OPD	Sumber Dana
1.	Sekretariat DPRD	APBD
2.	Sekretariat Daerah	APBD
3.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	APBD
4.	Dinas Pekerjaan Umum	APBD
5.	Dinas Kesehatan	APBD
6.	Dinas Pertanian	APBD
7.	Dinas Pendidikan	APBD
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	APBD
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	APBD
10.	Dinas Pangan dan Perikanan	APBD
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APBD
13.	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
14.	Badan Keuangan Daerah	APBD
15.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	APBD

No	Nama OPD	Sumber Dana
16.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	APBD
17.	Inspektorat Daerah	APBD
18.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	APBD
19.	Rumah Sakit Umum Daerah	APBD

Tabel 3.18
Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2018

No	Nama OPD	Sumber Dana
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	APBD
2.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	APBD
3.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	APBD
4.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	APBD
6.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	APBD
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	APBD
8.	Dinas Perhubungan	APBD
9.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD
10.	Kecamatan Sitiung	APBD
11.	Kecamatan Koto Baru	APBD

Tabel 3.19
Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2019

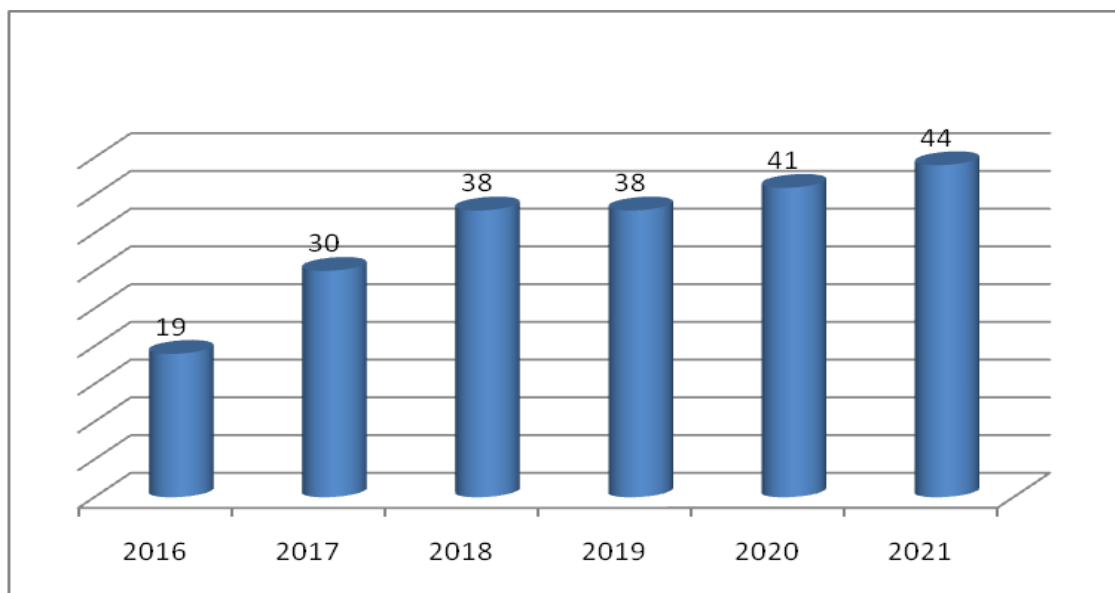
No	Nama OPD	Sumber Dana
1.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD
2.	Kecamatan Koto Besar	APBD
3.	Kecamatan Padang Laweh	APBD
4.	Kecamatan Koto Salak	APBD
5.	Kecamatan Timpeh	APBD
6.	Kecamatan Tiumang	APBD
7.	Kecamatan Sembilan Koto	APBD
8.	Kecamatan Asam Jujuhan	APBD

Tabel 3.20
Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2020

No	Nama	Sumber Dana
1.	Nagari Sungai Duo	APB Nagari
2.	Puskesmas Sitiung 1	BOP
3.	Puskesmas Padang Laweh	BOP

Tabel 3.21
Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2021

No	Nama OPD	Sumber Dana
1.	Nagari Sopan Jaya	APB Nagari
2.	Nagari Koto Besar	APB Nagari
3.	SMK N 1 Koto Baru	BOS



Gambar 3.6
Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah Yang Terintegrasi

Peningkatan jaringan OPD yang terintegrasi menggunakan tenaga pihak ke-3 untuk proses pembangunan dan pengaktifan jaringan dengan menggunakan astinet dari PT. Telkom. Monitoring pemasangan dan kerusakan dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informatika menggunakan tenaga PNS dan Non PNS.

➤ **Sasaran Strategis :**
Meningkatnya pengamanan informasi

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Persandian berperan mengamankan informasi yang bersifat rahasia dengan teknik enkripsi. Fungsi persandian ini dilaksanakan agar website dan atau aplikasi pelayanan tidak diretas atau dirusak oleh orang lain, sehingga mengganggu proses pelayanan.

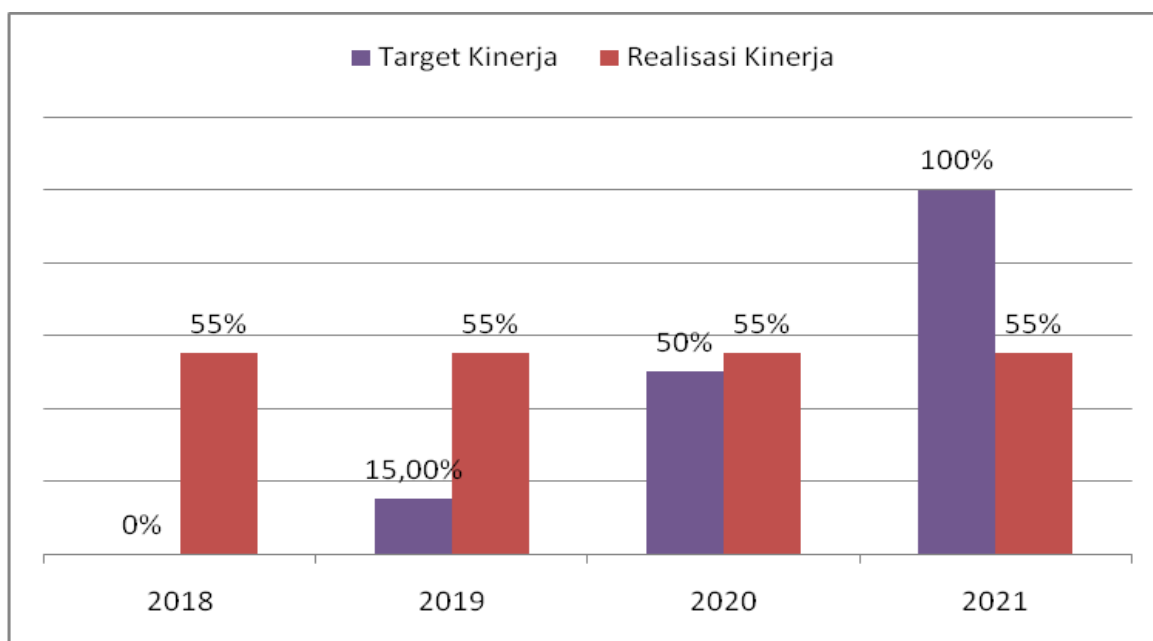
Dalam pencapaian sasaran strategis kedua ini yaitu meningkatnya pengamanan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil tabel di bawah ini. Sasaran strategis peningkatan pengamanan informasi ditargetkan 100% dalam tahun 2021. Tahun 2018 telah regulasi hukum berupa Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah diinformasikan ke seluruh OPD.

Tabel 3.23

Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	55%	55%
			- Jumlah website yang diberikan pengamanan sandi	138 Unit	21 Unit	
			- Jumlah perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya	38 OPD	38 OPD	
	Rata-Rata Kelompok Tertimbang					Cukup Berhasil
	Rata-Rata Capaian Sasaran (nilai mean)					55

Pencapaian tahun 2021 sebesar 55% sama dengan tahun 2020. Bidang persandian merupakan bidang baru yang dibebankan kepada daerah dan terus dilakukan berbagai upaya persiapan terutama regulasi hukum dalam pelaksanaan. Kegiatan dilakukan untuk pengamanan website sebanyak 21 website induk dan website subdomain. Selain itu, dilakukan pengamanan aplikasi yang dibangun oleh OPD dan berada di pusat server Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 4 (empat) jenis yaitu aplikasi SIPKD, Simda Keuangan, SKP Online, dan E-Disiplin.



Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2021 dalam IKU
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam
Komunikasi Perangkat Daerah

Pencapaian target pengamanan informasi diutamakan untuk pengamanan website dan berbagai aplikasi yang digunakan pemerintah daerah, maka dilaksanakan kerjasama dengan BSSN. Hal ini dilaksanakan karena belum adanya tenaga PNS yang memahami dan mampu melakukan pengamanan tersebut dengan kode persandian. Hal dasar yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pembentukan dasar hukum berupa Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pengamanan Informasi di Daerah dan akan dikembangkan dengan peraturan tentang pemanfaatan sertifikat digital.

➤ **Sasaran Strategis :**

Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Manfaat statistik sektoral adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend), menentukan prioritas, acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan. Data dan Informasi Statistik Sektoral menjadi acuan bagi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan.

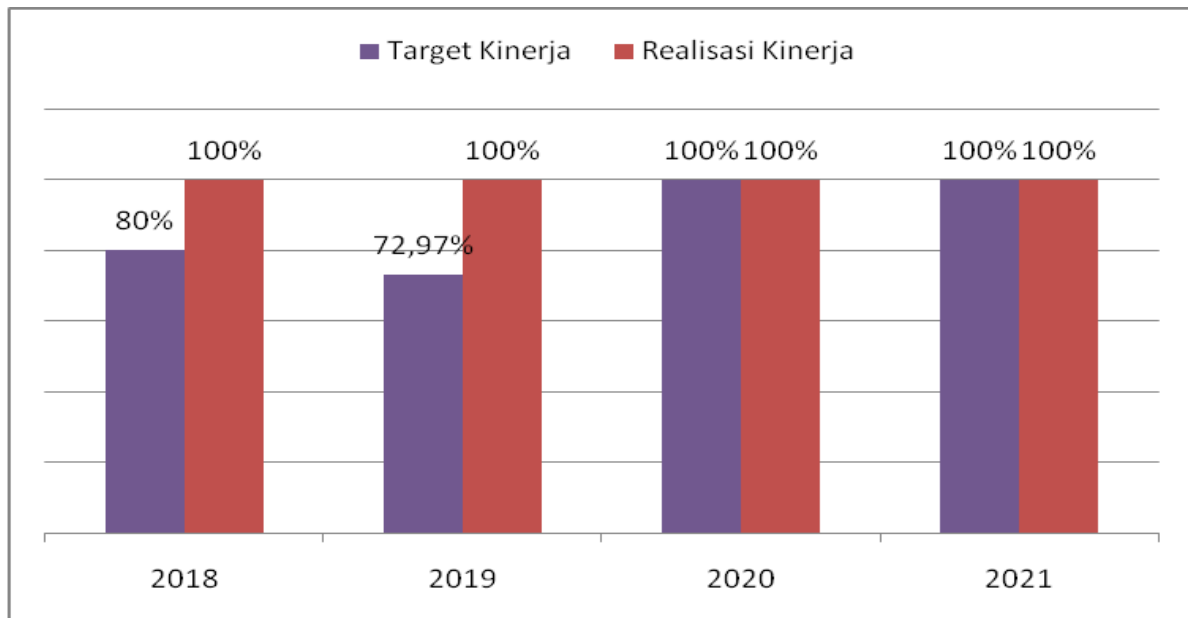
Tabel 3.25
Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan fungsi statistik sektoral dan data dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan perencanaan	Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Rata-Rata Kelompok Tertimbang						100	Sangat Berhasil
Rata-Rata Capaian Sasaran (nilai mean)							100

Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas, dalam tahun 2021 ditargetkan 100%. Dalam hal ini telah diambil data dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya atau terealisasi 100% dan disusun dalam buku Dharmasraya, PDRB pengeluaran dan PDRB menurut lapangan usaha, namun terjadi keterbatasan dalam pencetakan buku (hard copy) sehingga hanya dilakukan publikasi soft copy melalui website.

Tahun 2019 dilakukan terobosan untuk melakukan penyediaan data secara up date data setiap waktu melalui pembuatan website rumah data

<http://rumahdata.dharmasrayakab.go.id> yang dilakukan ditingkat nagari dengan launching Nagari Statistik di Nagari Sei Duo Kec. Sitiung, namun belum mampu mencapai seluruh nagari yang terkendala jaringan internet terintegrasi seluruh nagari.



Gambar 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2021 dalam IKU Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2020 dengan tahun 2021 sama sama tercapai 100%, namun terdapat peningkatan kualitas penyediaan data. Publikasi tahun 2021 dilakukan dalam bentuk softcopy melalui website. Tahun 2021 dilakukan dengan melakukan penyusunan detail dalam buku PDRB menjadi PDRB menurut produksi dan PDRB menurut lapangan usaha sesuai Tahun 2020.

Peningkatan kualitas dilaksanakan tahun 2019 melalui terobosan untuk melakukan penyediaan data secara up date data setiap waktu melalui pembuatan website rumah data <http://rumahdata.dharmasrayakab.go.id> yang dilakukan ditingkat nagari dengan launching Nagari Statistik di Nagari Sei Duo Kec. Sitiung, namun belum mampu mencapai seluruh nagari yang terkendala jaringan internet terintegrasi seluruh nagari. Nagari Statistik di Kab. Dharmasraya saat dilaunching merupakan satu-satunya di Indonesia yang melakukan up date data statistic setiap saat dan menjadi pilot project di Propinsi Sumatera Barat.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga dalam meningkatkan persentase ketersediaan data statistik sektoral menggunakan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Kekurangan staf dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga Non PNS. Sumber daya sarana dan prasarana sementara mencukupi untuk melaksanakan tugas. Kekurangan kendaraan disiasati dengan meminjam kendaraan operasional ketika membutuhkan pelaksanaan ke lapangan. Peningkatan kualitas dalam keberhasilan sasaran strategi ini didukung oleh adanya tenaga ahli programmer Non PNS yang direkrut tahun 2018 dan mulai aktif tahun 2019 yang mampu membuat website rumah data <http://rumahdata.dharmasrayakab.go.id> yang akan terus disempurnakan.

➤ **Sasaran Strategis :**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran strategis keempat yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dalam tahun 2021 ditargetkan Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai BB, dan telah berhasil mencapai nilai BB tersebut atau tercapai 100%.

Tabel 3.27
Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya	BB	BB	100%	Sangat Berhasil
Rata-Rata Kelompok Tertimbang						100	Sangat Berhasil
Rata-Rata Capaian Sasaran (nilai mean)							100

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2018 dengan tahun 2021 sama sama tercapai 100%, namun terdapat peningkatan kualitas penyajian laporan akuntabilitas kinerja. Peningkatan kualitas ini meningkat karena dukungan dari

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang membimbing penyusunan LAKIP dengan berbagai metode dan cara pendampingan sehingga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d Tahun 2021 dalam IKU Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							
			Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya	C	B	BB	BB	C	B	BB	BB

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis keempat dalam meningkatkan hasil penilaian AKIP Diskominfo oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya menggunakan tenaga yang ada melalui Kasubag. Keuangan, Program dan Perencanaan dan Staf Pengelola Program dan Perencanaan dengan bimbingan dan dukungan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Adapun biaya yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis ini menggunakan biaya yang berasal dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta memanfaatkan sumber daya sarana dan prasarana computer, laptop serta printer yang ada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rekapitulasi Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Target	Realisasi	%		DPPA	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	400.103.750	397.692.657	99,40%	
						Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	400.103.750	397.692.657	99,40%	
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	247.005.000	245.775.289	99,50%	
		Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%					Biaya dilakukan oleh Nagari dan apabila dilakukan pembinaan oleh Dinas Kominfo dibiayai melalui konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	100%	21%	21%					Pembinaan hanya dilakukan kepada kelompok yang sudah terbentuk dengan pemanfaatan SDM yang konsen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Target	Realisasi	%		DPPA	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	100%	100%	100%					kelompok ini. Kebutuhan kendaraan menggunakan kendaraan operasional
						Program : Aplikasi Informatika	678.251.300	677.332.400	99,86%	
						Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	678.251.300	677.332.400	99,86%	
						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	678.251.300	677.332.400	99,86%	
						Program : Informasi dan Komunikasi Publik	400.103.750	397.692.657	99,40%	
						Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	400.103.750	397.692.657	99,40%	
						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	108.995.750	108.693.918	99,72%	
2.	Meningkatnya Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah	100%	55%	55%	Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	52.234.250	50.608.350	96,89%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Target	Realisasi	%		DPPA	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah				Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.234.250	50.608.350	96,89%	
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.234.250	50.608.350	96,89%	
3.	Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	100%	100%	100%	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	118.339.500	117.873.300	99,61%	
						Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	118.339.500	117.873.300	99,61%	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	61.354.300	61.272.700	99,87%	
						Membangun Metadata Statistik Sektoral	19.529.000	19.389.600	99,29%	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	37.456.200	37.211.000	99,35%	
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil penilaian AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Inspektorat	BB	BB	100%					Biaya penunjang administrasi pelayanan umum

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, RKT Tahun 2021, RKPD Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini telah melaksanakan kegiatan terkait upaya mencapai smart city sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan E-Government
2. Pengadaan Bandwidth untuk melayani OPD
3. Melakukan Integrasi Jaringan OPD.
4. Pemeliharaan Jaringan Internet
5. Peningkatan jaringan integrasi sampai ke wilayah kecamatan
6. Pemanfaatan Tower Puncak Gunung Medan sebagai penyambung
7. Penambahan Wifi Publik
8. Pelaksanaan recruitment tenaga programmer
9. Pelaksanaan Pelatihan bagi Personil Kominfo dan Personil terkait website dan aplikasi di OPD

1.2 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Terkait Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, maka Pemerintah perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Akses informasi merupakan hak setiap warga masyarakat, oleh sebab itu pemerintah daerah wajib melakukan uji konsekuensi dalam kategori dikecualikan". Disamping itu untuk menciptakan masyarakat informasi, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat informasi tersebut.

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Dharmasraya yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintah Provinsi dan Pusat dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang masih jauh dari yang diharapkan, juga lihat dari jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informatika, maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

- Masih terdapatnya lokasi blankspot di Kabupaten Dharmasraya
- Belum optimalnya pemanfaatann teknologi informasi
- Kurangnya pengetahuan masyarakat akan informasi pembangunan
- Kurangnya respon/masukan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan
- Belum tersedianya data center
- Belum adanya gedung komando/command center teknologi informasi dan komunikasi
- Belum adanya grand desain pengembangan komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi

- 
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan komunikasi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
2. Komitmen dan keterlibatan pejabat pada top dan middle management di setiap OPD dalam workflow aplikasi yang masih belum optimal.
3. Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS (tingkat literasi TIK yang minim).
4. Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap OPD yang belum kuat.
5. Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi.
6. Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi.
7. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data.
8. Implementasi dan integrasi system informasi dan aplikasi di setoap Organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada bidang Persandian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya integrasi data perencanaan pembangunan daerah
2. Sistem pengelolaan dan penyajian data dilakukan secara parsial
3. Ketidakteragaman input data yang bersumber dari OPD dan instansi vertikal
4. Kelembagaan pengelolaan data belum mencerminkan kebutuhan dalam pembangunan
5. Belum adanya basis data yang handal, akurat, terintegrasi dan berkesinambungan untuk seluruh kebutuhan pembangunan
6. Kebutuhan akan tersedianya data dan informasi untuk indikator tertentu bergantung pada penyedia data
7. Data dan informasi pembangunan belum dianggap sebagai asset



Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada bidang Persandian adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi pusat dan daerah tentang persandian
2. Belum terdapatnya standar keamanan informasi
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang bersifat khusus pengelolaan sandi
4. Terbatasnya peralatan sandi yang berada di dalam negeri yang dapat diperoleh
5. Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola persandian



2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Bandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analiais Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting

5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang telah diterima dari proses Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD secara umum kebutuhan sarana komunikasi masyarakat berupa kemampuan penangkapan internet menggunakan handphone yang umumnya menjadi kewajiban pihak swasta. Pelaksanaan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah koordinasi dan monitoring terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Khusus pembangunan Blankspot akan dikoordinasikan dengan kementerian Komunikasi dan Informatika agar dapat dibangun melalui PT. Telkom yang merupakan perusahaan BUMN.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS)	Sinamar Kec. Asam Jujuhan	Meningkatkan akses	1 Unit	
2.	Peningkatan Jaringan 3G ke 4G	Alahan Nan Tigo Kec. Asam Jujuhan		1 Unit	
3.	Lanjutan Pembangunan Menara Telekomunikasi Sitiung	Sitiung		1 Unit	terbengkalai

Kondisi lain ditemui secara tidak langsung dimana dalam diskusi kegiatan Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD terdapat keluhan masyarakat untuk mempercepat proses pelayanan BPJS. Dinas Komunikasi dan Informatika memahami proses yang diinginkan adalah bagian dari proses smart city.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mempercepat pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di daerah, maka penyelenggara pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan memperhatikan aspek hubungan dengan pusat, potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terdapat beberapa urusan dalam bidang komunikasi dan informatika meliputi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Provinsi; Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan subdomain dilingkup Pemerintah Provinsi; serta Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Provinsi.

Terkait Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, maka Pemerintah Provinsi perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Akses informasi merupakan hak setiap warga masyarakat, oleh sebab itu pemerintah daerah wajib melakukan uji konsekuensi dalam kategori dikecualikan".

Sedangkan untuk pengelolaan nama domain, peran dari Pemerintah Daerah adalah menentukan struktur penamaan domain instansinya dan unit kerja yang berada dibawah struktur induk/instansi sesuai dengan peraturan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dari masing-masing daerah. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan penyelenggaraan website, konten, Sumber Daya Manusia serta infrastrukturnya. Terhitung Bulan Januari 2015 pendaftaran domain instansi pemerintah dapat didaftarkan melalui <https://domain.go.id>.

Disamping itu untuk menciptakan masyarakat informasi, berbudaya dan



berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat informasi tersebut.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2020, maka Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut :

"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu:

- 1) *Terwujudnya Indonesia Informatif*, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) *Masyarakat sejahtera*, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.

- 
- 3) *Pembangunan kominfo berkelanjutan*, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
 - 4) *Pembangunan kominfo yang merakyat* adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
 - 5) *Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan* adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.
 - 6) *NKRI*, yaitu Negara ke Organisasi Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Sementara rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan;
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Tahun 2021 merupakan tahun kelima masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya dalam mencapai visi jangka menengah 2016 -2021 yaitu :
"Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya ".

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2016–2021 telah ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2020 yaitu:

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur nagari.
3. Inventarisasi dan pelestarian khasanah warisan budaya dan sejarah daerah.
4. Percepatan pembangunan infrasturktur daerah.
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan kualitas guru.
6. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasara kesehatan, promotif, preventif serta SDM bidang kesehatan.
7. Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan sistem informasi daerah dan system perencanaan berbasis IT.
8. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup.

Secara khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menunjang dalam aspek infrastruktur melalui penyediaan infrastruktur bidang Komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian.

Berdasarkan Visi dan Misi Nasional yang tertuang dalam RPJM dan Visi Misi Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2021, maka dirumuskan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya. Visi tersebut adalah :

***“TERWUJUDNYA INTEGRASI SISTEM E-GOVERNMENT MENUJU
DHARMASRAYA SMART REGENCY”***

sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

2. Mengoptimalkan Sistem Layanan Pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi
3. Menyediakan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika yang memadai.
4. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Mengembangkan Kemitraan, dan Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Publik berbasis Kearifan Lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dharmasraya mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kominfo, maka Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 disesuaikan dengan target kinerja dalam indikator kinerja utama yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Tabel 4.1

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
		2022
Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	38 OPD
		10 Nagari



terintegrasi		10 SMP
		10 SD
		5 Puskesmas
Meningkatnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	10 Aplikasi Baru
Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65%
Meningkatnya pengamanan sistem informasi persandian	Aplikasi yang dilakukan asesment	5 Aplikasi
Meningkatnya Keamanan Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Aplikasi	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	40%
Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	60%
	Jumlah Nagari Statistik	20 Nagari
	Jumlah Kecamatan Statistik	2 Kecamatan
Meningkatnya kualitas imPlementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat	B
Meningkatnya Kinerja ASN	ASN yang tersertifikasi kompetensi	5 Orang

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan



pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya 2016-2021. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 4 (empat) program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2021 yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program informasi dan komunikasi publik
3. Program Penyelenggaraan statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program tersebut dirinci dalam masing-masing kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditampilkan dalam tabel 3.1

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 4 (empat) fungsi sesuai dengan tugas pokok yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
4. Bidang Statistik dan Persandian

Untuk Sekretariat dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.855.795.000
• Pembayaran Gaji Pegawai ASN	1.855.795.000
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.353.970
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.970.000
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.471.500
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.491.670
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.520.000
• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.900.400
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.400
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000.000
• Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (khusus dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	3.000.000.000
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.050.166.720

Daerah

- | | |
|---|-------------|
| • Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 |
| • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | 515.000.000 |
| • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.800.000 |
| • Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | 528.366.720 |

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang **39.244.250**

Urusan Pemerintahan Daerah

- | | |
|---|------------|
| • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | 39.244.250 |
|---|------------|

Untuk Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan 1 (satu)

Program yaitu :

1. Program Komunikasi dan Informatika **1.815.000.100**

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi **1.815.000.100**

Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- | | |
|---|-------------|
| • Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 388.955.300 |
| • Pelayanan Informasi Publik | 148.843.000 |
| • Layanan Hubungan Media | 924.788.000 |
| • Kemitraan Pemangku Kemitraan | 49.999.000 |
| • Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 202.372.000 |

Untuk Bidang Statistik dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di **40.152.000** Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- | | |
|--|------------|
| • Membangun Meta Data Statistik Sektoral | 40.152.000 |
|--|------------|

Untuk Bidang Persandian dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang



diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	20.056.200
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| • Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 20.056.200 |
|---|------------|

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	19.956.000
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| • Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 19.956.000 |
|---|------------|

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2022, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 2) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijakan Pemkab bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban secara umum, baik administrasi maupun non administrasi
- 3) Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat termasuk sekolah-sekolah agar mematuhi aturan berlalulintas yang baik, tertib dan disiplin dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

- 
- 4) Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia Di samping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain:
- a) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien
 - b) Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat
 - c) Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan
 - d) Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik
 - e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati Dharmasraya, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD

Sikabau, 2021

Kepala Dinas,

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si

Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19690829 199009 1 001

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dan Prakiraan Maju tahun 21
Kabupaten Dharmasraya

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Re
				Target capaian kinerja
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		BB
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat		
2.16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Buku SAKIP, Renstra, Renja, LPPD, LKPJ	DISKOMINFO	5 Dokumen
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	DISKOMINFO	85%
		Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan		93%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	DISKOMINFO	23 orang
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Proses rekon, review Keuangan Diskominfo secara semester dan akhir tahun serta penyusunan laporan keuangan	DISKOMINFO	2 Dokumen
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Proses rekon, review Barang Milik Daerah Diskominfo secara semester dan akhir tahun	DISKOMINFO	2 Dokumen
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Proses rekon, review retribusi Diskominfo secara triwulan, semester dan akhir tahun	DISKOMINFO	130 Dokumen
		ASN yang tersertifikasi kompetensi		
2.16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat yang diikuti Staf Diskominfo	DISKOMINFO	5 Orang
		Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Publik		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll	DISKOMINFO	10 jenis
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll	DISKOMINFO	6 Jenis
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll	DISKOMINFO	8 jenis
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK Kantor	DISKOMINFO	30 Jenis
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fitikopi, Jilid dan Cetak	DISKOMINFO	3 jenis
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu ke Diskominfo	DISKOMINFO	50 orang
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	DISKOMINFO	35 Orang
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain	DISKOMINFO	2 Aplikasi
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda 4 (1 unit), Roda 2 (3 unit)	DISKOMINFO	Roda 4 (1 unit)
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll	DISKOMINFO	5 Jenis
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Command Center th 1	Kec. Pulau Punjung	1 Unit
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sapras Gedung Command Center th 2	Kec. Pulau Punjung	
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai dan Surat Terkirim	DISKOMINFO	500 Materai, 40 Surat Keluar
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun	DISKOMINFO	Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll	DISKOMINFO	5 Jenis
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	DISKOMINFO	18 Orang
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah			
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	DISKOMINFO	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	Meningkatnya Penataan organisasi yang sesuai dengan beban kerja		
2.16.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kesesuaian Beban Pekerjaan antar Bidang dalam Dinas dan Kasi/Kasubag dalam Bidang/Sekretariat	DISKOMINFO	80%

		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	jumlah informasi pembangunan yang diberikan ke masyarakat		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Perda/Perbup tentang SPBE	DISKOMINFO	1 Perda
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	Kab. Dharmasraya	3 Paket
		Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	kontrak media	DISKOMINFO	10 Media
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Pemangku Kemitraan	Kelompok informasi masyarakat	DISKOMINFO	11 Kelompok
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM)	DISKOMINFO	3 Orang
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	10 Nagari 10 SMP 10 SD 5 Puskesmas
		Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		10 Aplikasi
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik)	DISKOMINFO	5 titik
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Integrasi Rumah Data	DISKOMINFO	22 Unit
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sosialisasi Aplikasi baru	DISKOMINFO	10 Aplikasi
2.16.03.2.02.08	penyelenggaraan sistim penghubung layanan Pemerintah	monev menara utk SKRD	Kab. Dharmasraya	130 Menara
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun	DISKOMINFO	0
		Persentase sistem elektronik yang dilakukan assesment		30%
2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah		

2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Asesment website oleh BSSN	DISKOMINFO	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN	DISKOMINFO	5 Aplikasi
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	DISKOMINFO	40%
		Persentase Terpenuhi Data Statistik Sektoral		
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah survey dan rekomendasi BPS	DISKOMINFO	3 kegiatan
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral	DISKOMINFO	3 Dokumen
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kecamatan/ nagari Statistik	Kab. Dharmasraya	2 Kecamatan dan 11 nagari
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pepndukung	DISKOMINFO	80 Orang

OPD tahun 2022

023

Rencana Tahun 2022		Catatan Penting	Rencana Tahun 2023		sumber dana
Kebutuhan Dana /pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana /pagu indikatif	
10,786,700,000				10,000,000	
			BB		
4,310,600,000	APBD			-	APBD
16,000,000	APBD			-	APBD
10,000,000			4 Dokumen	-	
3,000,000			87%	-	
3,000,000			95%	-	
4,288,600,000	APBD			-	APBD
4,283,600,000			23 orang	-	
5,000,000			2 Dokumen	-	
3,000,000	APBD			-	APBD
3,000,000			2 Dokumen	-	
3,000,000	APBD			-	APBD
3,000,000			130 Dokumen	-	
6,476,100,000	APBD			10,000,000	APBD
10,000,000				10,000,000	
10,000,000			5 Orang	10,000,000	
223,000,000	APBD			95,000,000	APBD

3,000,000			10 jenis	-	
20,000,000			6 Jenis	20,000,000	
5,000,000			8 jenis	-	
30,000,000			30 Jenis	30,000,000	
25,000,000			3 jenis	25,000,000	
10,000,000			50 orang	10,000,000	
120,000,000			35 Orang	-	
10,000,000			2 Aplikasi	10,000,000	
3,450,000,000	APBD			1,065,000,000	APBD
400,000,000			Roda 2 (1 unit)	15,000,000	
50,000,000			5 Jenis	50,000,000	
3,000,000,000			0		
			10 jenis	1,000,000,000	
2,787,600,000	APBD			2,787,600,000	APBD
2,000,000			500 Materai, 40 Surat Keluar	2,000,000	
500,000,000			Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun	500,000,000	
2,000,000			5 Jenis	2,000,000	
2,283,600,000			18 Orang	2,283,600,000	
2,500,000	APBD			2,750,000	APBD
2,500,000			Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (3 unit)	2,750,000	
3,000,000	APBD			-	APBD
3,000,000			80%	-	
1,350,000,000				1,890,000,000	

1,000,000,000	APBD			1,000,000,000	APBD
1,000,000,000				1,000,000,000	
100,000,000			1 Perda, 1 Perbup	100,000,000	
65,000,000			4 Paket	80,000,000	
500,000,000			10 Media	500,000,000	
50,000,000			20 Kelompok	50,000,000	
10,000,000			5 Orang	15,000,000	
1,000,000,000			20 Nagari	1,000,000,000	
			20 SMP		
			20 SD		
			8 Puskesmas		
350,000,000	APBD		15 Aplikasi	890,000,000	APBD
350,000,000	APBD			890,000,000	APBD
200,000,000			10 titik	200,000,000	
50,000,000			34 Unit	50,000,000	
150,000,000			15 Aplikasi	150,000,000	
200,000,000			130 Menara	200,000,000	
			5 Jenis	540,000,000	
100,000,000				100,000,000	
	APBD		32%		APBD
100,000,000				100,000,000	

100,000,000	APBD			100,000,000	APBD
100,000,000			10 Aplikasi	100,000,000	
50,000,000	APBD			100,000,000	APBD
50,000,000			50%	100,000,000	
450,000,000				650,000,000	
450,000,000	APBD			650,000,000	APBD
450,000,000				650,000,000	
150,000,000			5 kegiatan	250,000,000	
150,000,000			5 Dokumen	250,000,000	
50,000,000			4 Kecamatan dan 22 nagari	50,000,000	
100,000,000			100 Orang	100,000,000	

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dan Prakiraan Maju tahun 2
Kabupaten Dharmasraya

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Re
				Target capaian kinerja
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		BB
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat		
		ASN yang tersertifikasi Kompetensi		
2.16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	DISKOMINFO	23 orang
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Publik		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll	DISKOMINFO	10 jenis
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll	DISKOMINFO	6 Jenis
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll	DISKOMINFO	8 jenis
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK Kantor	DISKOMINFO	30 Jenis
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Fitikopi, Jilid dan Cetak	DISKOMINFO	3 jenis
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	DISKOMINFO	35 Orang
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Command Center th 1	Kec. Pulau Punjung	1 Unit
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sapras Gedung Command Center th 2	Kec. Pulau Punjung	
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai dan Surat Terkirim	DISKOMINFO	500 Materai, 40 Surat Keluar
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun	DISKOMINFO	Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll	DISKOMINFO	5 Jenis
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	THL 23 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 2 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	DISKOMINFO	18 Orang

2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah			
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	DISKOMINFO	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
		Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		
		Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	jumlah informasi pembangunan yang diberikan ke masyarakat		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyampaian informasi kegiatan daerah di media massa yang dikelola Diskominfo	DISKOMINFO	5 Jenis
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Pelaksanaan informasi melalui PPID	DISKOMINFO	3 Paket
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	kontrak media swasta	DISKOMINFO	10 Media
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Pemangku Kemitraan	Monev menara BTS	DISKOMINFO	130 unit
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM)	DISKOMINFO	3 Orang
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	10 Nagari 10 SMP 10 SD 5 Puskesmas
		Persentase sistem elektronik yang dilakukan assesment		30%
2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN	DISKOMINFO	5 Aplikasi
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	DISKOMINFO	40%
		Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral		
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral	DISKOMINFO	3 Dokumen

1 OPD tahun 2022

2023

3

Rencana Tahun 2022		Catatan Penting	Rencana Tahun 2023		sumber dana
Kebutuhan Dana /pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana /pagu indikatif	
7,902,768,240				6,889,261,861	
			BB		
6,027,559,940	APBD			4,427,515,501	APBD
1,855,795,000	APBD			2,041,374,500	APBD
1,855,795,000			23 orang	2,041,374,500	
82,353,970	APBD			201,007,837	APBD
1,970,000			10 jenis	2,167,000	
15,471,500			6 Jenis	20,000,000	
3,491,670			8 jenis	3,840,837	
7,520,000			30 Jenis	30,000,000	
13,900,400			3 jenis	25,000,000	
40,000,400			35 Orang	120,000,000	
3,000,000,000	APBD			1,000,000,000	APBD
3,000,000,000		Pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR	0	-	
-			10 jenis	1,000,000,000	
1,050,166,720	APBD			1,138,040,064	APBD
2,000,000			500 Materai, 40 Surat Keluar	2,000,000	
515,000,000			Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun	500,000,000	
4,800,000			5 Jenis	2,000,000	
528,366,720			18 Orang	634,040,064	

39,244,250	APBD			47,093,100	APBD
39,244,250			Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (3 unit)	47,093,100	
1,815,000,100	APBD			2,111,746,360	APBD
1,815,000,100				2,111,746,360	
388,955,300			5 Jenis	466,746,360	
148,843,000			4 Paket	80,000,000	
924,788,000			10 Media	500,000,000	
49,999,000			20 Kelompok	50,000,000	
202,372,000			5 Orang	15,000,000	
100,042,800			20 Nagari	1,000,000,000	
			20 SMP		
			20 SD		
			8 Puskesmas		
	APBD		32%		APBD
20,056,200				100,000,000	
20,056,200	APBD			100,000,000	APBD
20,056,200			10 Aplikasi	100,000,000	
19,956,000	APBD			100,000,000	APBD
19,956,000			50%	100,000,000	
40,152,000	APBD			250,000,000	APBD
40,152,000				250,000,000	
40,152,000			5 Dokumen	250,000,000	